



Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Ormas Terhadap Manajemen Pembinaan Ormas Untuk Mewujudkan Efektivitas Pencapaian Program Pembinaan Ormas Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Garut

Hilmi Noor Ihsan

Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara, Universitas Garut

24091119009@uniga.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Ormas terhadap Manajemen Pembinaan Ormas untuk Mewujudkan Efektivitas Pencapaian Program Pembinaan Ormas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 responden yang diambil sampel berdasarkan menggunakan teknik sampel jenuh (sensus). Teknik analisis data untuk menjawab hipotesis penelitian adalah analisis statistik dengan model analisis jalur (path analysis) menggunakan *Microsoft excel*. Pengujian terhadap hipotesis utama menunjukkan nilai F-hitung lebih kecil dari nilai F-tabel yaitu $F\text{-hitung} = 10,9651 < F\text{-tabel} = 1,5695$. diperoleh nilai $t\text{-hitung}$ lebih kecil dari nilai $t\text{-tabel}$ yaitu $t\text{-hitung} = 4,2518 > t\text{-tabel} = 1,6600$. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan H_0 ditolak, sehingga variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Organisasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pembinaan organisasi masyarakat dalam mewujudkan efektivitas pencapaian program pembinaan organisasi masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut, dengan besaran nilai Koefisien Determinasi (R^2 YZX) sebesar = 0,6046. Nilai tersebut diartikan bahwa Pelaksanaan kebijakan pembinaan Ormas berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Pembinaan Ormas untuk mewujudkan efektivitas Pencapaian Program Pembinaan Ormas sebesar 60,46%, sedangkan sisanya sebesar 39,54% (Epsilon) dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Organisasi masyarakat yang tidak dimasukkan ke dalam model. Temuan pada Pelaksanaan kebijakan pembinaan Ormas dalam dimensi sumber daya terkait dengan Alokasi anggaran dalam Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan, Manajemen Pembinaan Ormas dalam dimensi penyusunan pegawai (*staffing*) yaitu terkait dengan peningkatan jenjang pendidikan pegawai sedangkan pada efektivitas Pencapaian Program Pembinaan Ormas dalam dimensi Motivasi hal tersebut ditemukan kurangnya motivasi terhadap pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut.

Kata Kunci: Efektivitas, Masyarakat, Pembinaan.

1. Pendahuluan

Eksistensi Ormas di Indonesia telah dijamin dalam UU Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pada pertengahan tahun 2013, jumlah ormas Indonesia telah

mencapai sekitar 99.000, sedangkan jumlah ormas Kabupaten Garut pada tahun 2015 sebanyak 321. Undang-undang Ormas Tahun 2013 menyatakan bahwa Ormas adalah organisasi yang dibuat dan dibentuk secara sukarela oleh masyarakat berdasarkan kesamaan aspirasi, keinginan, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan, untuk mencapai tujuan suatu bangsa. Indonesia berdasarkan Pancasila.

Pemantauan perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan aktivitas dan akuntabilitas CSO, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan 56b Republik Indonesia Tahun 2017. Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Garut, khususnya Badan Kesatuan Politik Nasional. Kabupaten Cimaruta merupakan salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Garut, berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 8 Tahun 2012 dan Peraturan Bupati Nomor 8. Badan Kesatuan Politik Nasional 552 tahun 2012 mempunyai misi dan fungsi pokok sebagai penyelenggara: perumusan, pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang persatuan dan kebijakan nasional.

Melihat dari hasil laporan kegiatan peningkatan peran dan fungsi KESBAGPOL Kabupaten Garut pada hari Tanggal 26 April 2019 yang bertempat di Aula MAKODIM 0611 Garut dengan peserta sebanyak 190 Ormas yang tercatat pada Kabupaten Garut. Narasumber dari kegiatan ini adalah sebagai berikut: Kepala Badan Kesabangpol Kabupaten Garut dengan tema pemaparan tentang manajemen Peran Fungsi Ormas dalam menghadapi tantangan masa kini dan Masa yang akan datang dikarenakan peran dan fungsi Ormas di Kabupaten Garut yang belum maksimal. Dandim 0611 Garut dengan memaparkan tentang peningkatan peran dan fungsi Ormas dalam menunjang kondusifitas di Kabupaten Garut. Kapolres Garut yang diwakili oleh Kanit Intelkan Polres Garut dengan pemaparan etika penyampaian pendapat dimuka umum yang masih kurang baik dilakukan oleh Ormas. Kasdim 0611 Garut dengan pemaparan pentingnya mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat luas.

Pada kegiatan tersebut diadakan diskusi dengan dua sesi pertanyaan dan pernyataan dari Ormas yang hadir dalam kegiatan. Pertama Surya dari Ormas KOMRAT dengan pertanyaan tentang pelanggaran penyampaian pendapat dimuka umum dengan lokasi diluar daerah sehingga Ormas tidak bisa menyampaikan aspirasi maksud dan tujuannya untuk membela agama dan negara. Irma dari Ormas Dahlia dengan pernyataan bagaimana caranya pemberdayaan Ormas bisa berorientasi bisnis dengan baik. Vicktor dari Ormas KPJB dengan pernyataan tentang hak dan kewajiban Ormas di Kabupaten Garut yang kurang tersampaikan. Selanjutnya Suwitno dari FMSG menyampaikan pendapat bahwa belum merasakan kebijakan dan manajemen dari KESBAGPOL Kabupaten Garut karena kurangnya kegiatan yang berlangsung secara dua arah.

Dalam perjalanannya, Ormas di Kabupaten Garut untuk menjalankan bisnis organisasi, mereka sering melakukan pemerasan, penyitaan tanah, membantu pengusaha, dan membantu politisi. Praktik ini bisa menjadi konflik jika ada kepentingan bersama dengan kelompok yang berbeda. Pada akhirnya, konflik tidak terhindarkan dan nyawa manusia serta harta benda hilang. Jika pertumbuhan organisasi tidak dikendalikan dengan bijak, Ormas berlatar belakang fundamentalis cenderung semakin kuat, memecah belah masyarakat, dan menciptakan kerawanan konflik sosial. Jika ini terus berlanjut dan negara acuh tak acuh, tetapi menjadi lebih kuat, pertikaian antar ormas tidak dapat dihindari dan dapat mengganggu stabilitas negara.

Untuk memaksimalkan efektivitas pencapaian program kerja Ormas tersebut, tentu harus di tunjang dengan pelaksanaan manajemen yang baik oleh pelaksananya. Organisasi atau dalam hal ini Kesbangpol Kabupaten Garut meliputi kegiatan atau kebutuhan pekerjaan. Dalam hal ini berarti mengelola kegiatan yang dilakukan oleh karyawan Kesbangpol.

Berbagai kebijakan, upaya, dan tindakan telah dilakukan oleh pemerintah untuk memberdayakan dan mengembangkan Ormas salah satunya melalui kegiatan manajemen pembinaan Ormas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017, bahwa keberadaan Ormas harus memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Kesbangpol Kabupaten Garut melaksanakan program dan kegiatan Berdasarkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut 2014-2019, yakni telah melaksanakan 5 program kegiatan manajemen pembinaan yang dilaksanakan kepada Ormas, sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
2. Program Peningkatan Peran dan Fungsi Ormas
3. Pemberdayaan Ormas Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
4. Program Pendidikan Politik Organisasi Masyarakat
5. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Konflik.

Menurut Penyerapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut hanya melaksanakan alokasi kegiatan sebesar 71%, dan menurut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut dari tahun 2016 (366 Ormas) dan menurun pada tahun 2017 (195 Ormas) sehingga pencapaian program kerja pembinaan Ormas belum dilaksanakan dengan baik.

Di pemerintah daerah, badan yang bertanggung jawab mengatur kegiatan organisasi kemasyarakatan adalah badan persatuan nasional dan politik baik di negara bagian maupun provinsi/kota di seluruh Indonesia. Sesuai Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Ormas di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan di Pemerintah Daerah, pada Pasal 6 ayat (2) Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi mengajukan permohonan pendaftaran kepada gubernur melalui SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang membindangi yaitu Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.

Namun pada implementasinya dilapangan, kebijakan yang dilaksanakan belum dilaksanakan dengan baik, meneurut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut dari 327 Ormas yang terdaftar hanya 190 yang mengikuti kegiatan program pembinaan Ormas. Semestinya program pembinaan ini harus diikuti oleh semua Ormas yang berada di Kabupaten Garut. Berdasarkan fakta-fakta tersebut tak heran jika Ormas tidak memiliki pencapaian program kerja yang terarah.

Di sini, peran penting kebijakan pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting. Idealnya, penguatan organisasi kemasyarakatan oleh pemerintah pusat dan daerah bertujuan untuk mewujudkan efektifitas hasil program pembinaan Ormas sehingga Ormas dapat menjadi organisasi yang kuat dan mandiri. Kemandirian ini memungkinkan dia untuk memainkan perannya yang sebenarnya dan menjadi benar-benar mandiri.

Penomena permasalahan berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dikaji adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan Ormas belum dilaksanakan secara optimal, yang diantaranya komunikasi belum efektif, sumberdaya dalam penanganan organisasi kemasyarakatan belum memadai, dan kurang tegasnya sikap aparaturnya dalam penanganan permasalahan hal ini diperlukan adanya ketegasan pembinaan Ormas oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut Kegiatan. Dari hasil observasi dilapangan bahwa angka kriminalitas di Kabupaten Garut pada tahun 2016 ada 245 dan meningkat pada tahun 2017 sebanyak 255 kasus, dari data tersebut

bahwa pelaksanaan kebijakan Organisasi masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Garut masih belum baik.

2. Manajemen pembinaan Ormas yang belum optimal yang diantaranya adalah belum adanya perencanaan yang baik dalam pengelolaan organisasi kemasyarakatan, kurangnya pengarahan dari aparatur pemerintahan dan lemahnya koordinasi dengan Bakesbangpol Kabupaten Garut hal ini dapat dilihat dari jumlah Ormas yang mengikuti pembinaan menurun tiap tahunnya pada tahun 2018 dari 327 Ormas yang terdaftar hanya 190 yang mengikuti kegiatan program pembinaan Ormas.
3. Efektivitas pencapaian program pembinaan Organisasi masyarakat masih belum efektif hal dapat dilihat dari adaptasi Organisasi masyarakat dengan masyarakat kurang baik, hal ini dari hasil observasi dilapangan bahwa ada beberap organisasi masyarakat yang terjadi konflik pada tahun 2016 terjadi 16 kasus dan pada tahun 2017 meningingkat menjadi 18 kasus, hal ini di indikasi masih lemahnya pembinaan terhadap Organisasi masyarakat serta banyaknya Organisasi masyarakat yang tidak produktif.

Sehubungan dengan fakta-fakta fenomena masalah tersebut peneliti menduga adanya hubungan kausal efektif (sebab akibat) yang perlu dikaji lebih lanjut. Atas dasar itu penting diteliti dengan judul: “Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Ormas Terhadap Manajemen Pembinaan Ormas dalam Mewujudkan Pencapaian Program Pembinaan Ormas Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Garut”.

2. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu metode eksplanasi dengan teknik evaluasi sedangkan untuk Variabel Pada penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan satu variabel bebas, satu variabel antara dan satu variabel terikat yang hubungan antara variabelnya bersifat *causal effectual*, yaitu Variabel Bebas (*Independent Variable*), yaitu Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Ormas (X), Variabel Antara (*Intervening Variable*), Manajemen Pembinaan Ormas (Y) dan Variabel Terikat (*Dependent Variable*), yaitu Efektivitas Pencapaian Program Pembinaan Ormas (Z)

Adapun sasaran populasi (population target) dari penelitian ini adalah populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 190 Pimpinan Ormas yang melaksanakan program pembinaan Ormas dan 34 Orang Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut dan sampelnya sebanyak 100 responden.

Pengumpulan data yang digunakan: Literatur dan survei lapangan: Observasi, wawancara, dan angket Uji peralatan Survei uji validitas dan reliabilitas, serta teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif dan statistic.

3. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai dampak penerapan Kebijakan Konsultasi Ormas terhadap Manajemen Pengembangan Ormas dalam mencapai efektivitas pelaksanaan Program Konsultasi Ormas adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Dampak Penerapan Kebijakan

Variabel		Nilai Rata-rata	% Tertinggi	% Terendah
Variabel Kebijakan Organisasi	Pelaksanaan Pembinaan masyarakat	74,89% (Baik)	83,60% (Sangat Baik)	62,40%, (Cukup Baik)
Jumlah Item : 31 Pertanyaan				
Temuan Permasalahan:		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya Alokasi anggaran dalam Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan. 2. Kurangnya Kemampuan Pegawai dalam berkomunikasi dengan organisasi internal 3. Lemahnya mengkomunikasikan peran dan fungsinya terhadap organisasi 		
Manajemen Organisasi	Pembinaan masyarakat	77,59% (Baik)	86,20% (Sangat Baik)	71,60% (cukup Baik)
Jumlah item: 44 pertanyaan				
Temuan Permasalahan:		<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya peningkatan jenjang pendidikan pegawai di Badan Kesatuan Bangsa 2. kurangnya Motivasi dari rekan kerja di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut 3. Belum adanya Strategi pencapaian pembinaan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Garut 		
Efektivitas Program Organisasi	Pencapaian Pembinaan masyarakat	79,09% (Baik)	87,40% (Sangat Baik)	70,80% (Cukup Baik)
Jumlah item: 32				
Temuan Permasalahan:		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya motivasi pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut 2. Belum sesuai Tujuan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut 3. Besarnya beban Pekerjaan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut 		

Hasil analisis di atas menunjukkan bahwa variabel implementasi kebijakan pembangunan Ormas memiliki kriteria baik. Metrik dengan nilai persentase tertinggi berada pada dimensi sumber daya, dan metrik sarana prasarana pengembangan organisasi masyarakat memiliki kriteria sangat baik. Metrik dengan nilai persentase terendah ada pada dimensi sumber daya, namun metrik alokasi anggaran dalam pengembangan organisasi masyarakat berjalan dengan baik. Variabel OrmasDevelopmentManagement memiliki kriteria yang baik. Indikator dengan nilai persentase tertinggi ada pada aspek kepegawaian. Dengan kata lain, merupakan satu kesatuan indikator Kesatuan Bangsa dan Persatuan Politik Mabes Kabupaten, dengan standar yang sangat baik. Di sisi lain, persentase terendah terlihat pada dimensi kepegawaian. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pegawai Pemerintah Kesatuan Bangsa meningkat dengan standar yang sesuai. Selain itu, berbagai dampak efektivitas kinerja program pengembangan Ormas menetapkan kriteria sangat baik. Metrik persentase tertinggi memiliki kriteria sangat baik untuk rincian kegiatan pengembangan organisasi masyarakat lembaga gartry adaptif menggunakan metrik, dan persentase terendah telah menggunakan metrik motivasi karyawan dalam unifikasi nasional dan politik, yaitu pada dimensi motivasi. Agensi Gartry Agency dengan standar yang baik.

Sedangkan untuk hasil pengujian hipotesis menggunakan statistik adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Sub Hipotesis Utama

Hipotesis	Nilai t	Koefisien Jalur	Koefisien Determinan	Keputusan
Hipotesis utama Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Ormas terhadap Manajemen Ormas dalam Mewujudkan Efektivitas Pencapaian Program Pembinaan Ormas	$t_{hitung} = 4,2518$ $> t_{tabel} = 1,6600$	0,6345	0,6046.	$H_0 =$ ditolak $H_1 =$ diterima
Kesimpulan :	Implementasi kebijakan pengembangan organisasi kemasyarakatan berdampak besar terhadap pengelolaan pengembangan organisasi kemasyarakatan, mencapai 60,46% efektivitas pelaksanaan program pengembangan organisasi masyarakat di Badan Persatuan Politik Nasional Kabupaten Garth, dan sisanya 39,54 %% (epsilon). Dipengaruhi oleh variabel lain.			

Tabel 3. Sub Hipotesis 1 Variabel X terhadap Y

Pengujian	Nilai t	Koefisien Jalur	Koefisien Determinan	Keputusan
Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Ormas terhadap Manajemen Ormas	$t_{hitung} = 3,4132 >$ $t_{tabel} = 1,6660$	0,8667	0,6042	H_0 ditolak H_1 diterima
Kesimpulan :	Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Organisasi masyarakat kurang signifikan berpengaruh terhadap manajemen pembinaan organisasi masyarakat sebesar 36,51%, sedangkan sisanya sebesar 60,42% merupakan pengaruh variabel lainnya diluar variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Organisasi masyarakat yang tidak dimasukkan ke dalam model			

Tabel 4. Sub Hipotesis 2 Variabel Y terhadap Z

Pengujian	Nilai t	Koefisien Jalur	Koefisien Determinan	Keputusan
Pengaruh Manajemen Ormas terhadap efektivitas Pencapaian Program Pembinaan Ormas	$t_{hitung} = 8,6313 >$ $t_{tabel} = 1,6660$	0,2065	0,4283	H_0 ditolak H_1 diterima
Kesimpulan :	Manajemen pembinaan organisasi masyarakat kurang signifikan berpengaruh terhadap efektivitas pencapaian program pembinaan organisasi masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut sebesar 42.83%, sedangkan sisanya sebesar 57,17% merupakan pengaruh variabel lainnya diluar variabel manajemen pembinaan organisasi masyarakat yang tidak dimasukkan ke dalam model			

Tabel 5. Sub Hipotesis 3 Variabel X terhadap Z

Pengujian	Nilai t	Koefisien Jalur	Koefisien Determinan	Keputusan
Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Ormas	$t_{hitung} = 3,4132$ $> t_{tabel} = 1,6660$	0,1333	0,2981	H_0 ditolak H_1 diterima

terhadap efektivitas Pencapaian Program Pembinaan Ormas	
Kesimpulan :	Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Organisasi masyarakat kurang signifikan berpengaruh terhadap efektivitas pencapaian program pembinaan organisasi masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut sebesar 29.81%, sedangkan sisanya sebesar 70,19% merupakan pengaruh variabel lainnya diluar variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Organisasi masyarakat yang tidak dimasukkan ke dalam model

Hasil Pengujian Hipotesis utama dalam penelitian ini Berdasarkan pengujian, diperoleh nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} dan diperoleh keputusan H_0 ditolak, sehingga variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Organisasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pembinaan organisasi masyarakat dalam mewujudkan efektivitas pencapaian program pembinaan organisasi masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut.

Hasil uji hipotesis utama penelitian ini: Berdasarkan pengujian nilai t_{hitung} lebih kecil dari nilai t_{tabel} keputusan H_0 ditolak, maka variabel implementasi kebijakan pengembangan organisasi kemasyarakatan adalah sebagai berikut : Menjadi. Berpengaruh positif dan penting dalam mengelola pengembangan organisasi masyarakat dalam mencapai efektivitas penawaran program. Persatuan nasional Kabupaten Garth dan pengembangan organisasi kemasyarakatan di Badan Politik.

Sedangkan untuk hasil pengujian pada sub hipotesis dari variabel-variabel yang diteliti, adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan pembinaan Ormas terhadap berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap manajemen pembinaan Ormas. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen pembinaan Ormas tidak bisa terlepas dari pengaruh kebijakan pembinaan Ormas. Aspek-aspek pelaksanaan kebijakan yang berpengaruh terhadap manajemen pembinaan meliputi : Komunikasi, Sumber daya, Disposisi atau sikap para pelaksana dan Struktur Birokrasi. Pelaksanaan kebijakan pembinaan Ormas yang efektif diharapkan akan membantu meningkatkan manajemen pembinaan Ormas. Artinya, manajemen pembinaan Ormas yang optimal merupakan salah satu wujud transmisi pelaksanaan kebijakan yang baik dari pemerintahan.
2. Manajemen Pembinaan Ormas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap efektivitas Pencapaian Program Pembinaan Ormas. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan program tidak dapat terlepas dari aspek-aspek yang ada dalam manajemen pembinaan ormas yaitu Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Penyusunan Pegawai (*Staffing*), Pengarahan (*Directing*), Pengkoordinasian (*Coordinating*), Pelaporan (*Reporting*), dan Penganggaran (*Budgeting*).
3. Penegakan Kebijakan Pengembangan Ormas berdampak positif dan signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Program Pengembangan Ormas. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan Ormas berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap efektivitas pelaksanaan program pengembangan Ormas. Manajemen Pembinaan Ormas yang kurang konsisten ditimbulkan oleh tidak optimalnya komunikasi tentang sasaran kebijakan, sehingga berimbas terhadap efektivitas pelaksanaan program karena lemahnya penerapan aturan oleh pelaksana kebijakan.

Disamping hasil pengujian, terdapat pula hal-hal penting yang menjadi temuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Pada variabel Pelaksanaan kebijakan pembinaan Ormas dalam dimensi sumber daya ditemukannya Alokasi anggaran dalam Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan masih lemah hal ini didasarkan pada penilaian terendah pada variabel tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Alokasi anggaran dalam Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan masih belum memadai di karenakan rekopusi anggran pemerintah untuk penanganan Covid 19.
2. Pada variabel Manajemen Pembinaan Ormas dalam dimensi penyusunan pegawai (staffing) yaitu terkait dengan peningkatan jenjang pendidikan pegawai di Badan Kesatuan Bangsa yaitu kuantitas pegawai sudah memadai tetapi dilihat dari jenjang pendidikan masih kurang. Hal ini tentunya menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah mengingat kualitas pendidikan dirasa masih kurang.
3. Pada variabel efektivitas Pencapaian Program Pembinaan Ormas dalam dimensi Motivasi hal tersebut ditemukan kurangnya motivasi terhadap pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut.

Dengan dilandasi teori-teori, fakta dan data, hasil penelitian ini menunjukkan hubungan konseptual yang kuat diantara variabel-variabel yang diteliti. Keeratan hubungan antara konsep Pelaksanaan kebijakan pembinaan Ormas, Manajemen Pembinaan Ormas dan efektivitas Pencapaian Program Pembinaan Ormas dibuktikan bahwa satu sama lain saling berkaitan dan memiliki korelasi yang cukup signifikan.

4. Kesimpulan

Hasil dari penelitian bahwa Rata-rata jawaban responden terhadap ketiga variabel tersebut adalah Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Ormas menunjukan kriteria Baik, Manajemen Pembinaan Ormas menunjukkan kriteria baik dan Efektivitas Pencapaian Program Pembinaan Ormas menunjukkan kriteria baik.

Hasil Pengujian Hipotesis utama variabel Pelaksanaan Kebijakan Pembinaan Organisasi masyarakat berpengaruh tepat dan signifikan terhadap manajemen pembinaan organisasi masyarakat dalam mewujudkan efektivitas pencapaian program pembinaan organisasi masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut, untuk sub hipotesis 1 berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap manajemen pembinaan Ormas. Untuk sub hipotesis 2 berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap efektivitas Pencapaian Program Pembinaan Ormas. Dan untuk sub hipotesis 3 berpengaruh secara positif dan cukup signifikan terhadap efektivitas Pencapaian Program Pembinaan Ormas.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab, S. (2012). *Analisa Kebijakan Dari Formulasi Kebijaksanaan Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, L. (2014). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.

- Anggarini, Y., & Puranta, B. H. (2010). *Anggaran berbasis kinerja: Penyusunan APBD secara komprehensif*. Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen (STIM) YKPN.
- Chen, J., & Silverthorne, C. (2008). The impact of locus of control on job stress, job performance and job satisfaction in Taiwan. *Leadership & Organization Development Journal*.
- Iskandar, J. (2016). *Kapita selekta administrasi Negara*. Bandung: Puspaga.
- Kharisma, B., & Triwardani, W. A. (2018). Optimalisasi Aksesibilitas Sebagai Percepatan Pembangunan: Studi Kasus Penataan Jalan di Kabupaten Pangandaran. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 5, 1407.
- Mahoney, T. A. (1963). *Development of managerial performance: A research approach*. South-western Publishing Company.
- Pradikta, E. S. (2014). Efektivitas Program E-Performance Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Peningkatan Kinerja Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Surabaya. *Jurnal*, 2.
- Purnama, I. (2019). *Dampak kebijakan pemerintah dompu dalam pengembangan objek wisata Pantai Lakey terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Desa Hu'u Kabupaten Dompu*. Universitas Islam Negeri Mataram.
- Robert, K., & Angelo, K. (2005). *Organizational Behavior (Terjemahan) Buku 1. Edisi Kelima, Salemba Empat, Jakarta*.
- Sinambela, L. P. (2019). *Reformasi pelayanan publik: teori, Kebijakan dan implementasi*.
- Subarsono, A. G. (2005). *Analisis Kebijaksanaan Publik. Edisi Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta*.
- William, D. N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta. Gajah Mada. University Press*.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik Teori, Proses dan studi kasus, Jakarta: PT. Buku Seru*.